



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI**

**(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, RISTEK DIKTI, DAN PERPUSNAS)**

Tahun Sidang	: 2016 - 2017.
Masa Persidangan ke-	: V (Lima).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Kerja.
Dengan	: Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI.
Hari/Tanggal	: Senin, 12 Juni 2017.
Pukul	: 10.00 s/d selesai.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI.
Pimpinan Rapat	: Ferdiansyah S.E., M.M/Wakil Ketua Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Khairunnisa, S.Sos/Kabagset Komisi X DPR RI.
Acara	: 1. Pembahasan RKP dan RKA-KL TA 2018; dan 2. Lain-lain.
Hadir	: 39 orang dari 52 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	: Mohamad Nasir/Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi beserta jajarannya

I. PENDAHULUAN.

Rapat Kerja Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 11.15 oleh Ferdiansyah, S.E., M.M. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan pasal 246 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI serta menampung pertanyaan, saran dari Anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

A. Pembahasan RKP dan RKA-K/L TA 2018

1. Kemenristekdikti RI menyampaikan proyek prioritas (nasional) di Kemenristekdikti RI untuk tahun 2018 adalah sbb:

No	Proyek	Target	Indikasi Alokasi (Juta Rp)	Prioritas Nasional
I	Fungsi Pendidikan		4.898.257,4	
1	Pendirian Politeknik dan Prodi Khusus untuk kebutuhan industri	12 PTN	320.000	Pendidikan

2	Pengelolaan/Pengembangan PTN Baru dan Akademi Komunitas	72 PTN	176.084	Pendidikan
3	Pembukaan Prodi Khusus Blok Masela	10 Unit Prodi	15.000	Pendidikan
4	Revitalisasi LPTK	75 LPTK	31.200	Pendidikan
5	Beasiswa SM3T/PPG/PPGT bagi Guru	25.000 orang	352.285,7	Pendidikan
6	Beasiswa Bidik Misi	368.961 orang	3.764.798,3	Penanggulangan Kemiskinan
7	Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) Papua dan Papua Barat	3.743 orang	62.882,4	Pembangunan Wilayah
8	Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) 3T	2.000 orang	36.800	Pembangunan Wilayah
9	Pengembangan Calon Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi dari Perguruan Tinggi	50 unit	40.000	Penanggulangan Kemiskinan
10	Pengembangan <i>Teaching Industry</i>	11 unit	99.207	Pendidikan
II	Fungsi Layanan Umum		112.858,10	
1	Pengembangan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi	105 unit	62.858,10	Penanggulangan Kemiskinan
2	Penguatan Inovasi Litbang dan Industri	40 inovasi	50.000	Pengembangan Dunia Usaha dan Dunia Industri
	Total		5.011.115,50	

- Kemenristekdikti RI menyampaikan usul pagu indikatif RAPBN TA 2018 sebesar Rp41.231.223.119.000,- (*empat puluh satu triliun dua ratus tiga puluh satu miliar dua ratus dua puluh tiga juta seratus sembilan belas ribu rupiah*), yang didalamnya terdapat anggaran fungsi pendidikan sebesar Rp40.340.940.000.000,- (*empat puluh triliun tiga ratus empat puluh miliar sembilan ratus empat puluh juta rupiah*).
- Kemenristekdikti RI menyampaikan anggaran fungsi pendidikan sebesar Rp40,34 triliun untuk rancangan kegiatan prioritas Kemenristekdikti TA 2018 yaitu sbb:

No	Kegiatan Prioritas	Indikasi Alokasi (Juta Rp)
1	Beasiswa Bidikmisi, PPA, ADik 494.704 mahasiswa	4.440.000
2	Beasiswa SM3T dan PPGT 25.000 mahasiswa	352.280

3	BOPTN 107 PTN dan BPPTN-BH untuk 11 PTN-BH	5.060.000
4	Beasiswa S2/S3 9.266 dosen	594.470
5	Beasiswa KNB 560 mahasiswa	28.650
6	Akademi Komunitas dan Pengembangan PT, 72 PT	176.080
7	Revitalisasi Pendidikan Vokasi untuk 12 Politeknik	320.000
8	PHP PTS 25 PTS	25.000
9	Pembukaan Prodi Blok Masela 10 Prodi	15.000
10	Calon PPBT dari Perguruan Tinggi 50 unit	40.000
11	PNBP/BLU 107 PTN	9.680.000
12	Gaji dan Tunjangan Dose/Guru Besar/Pegawai untuk 139 Satker	14.590.000
13	Operasional Pemeliharaan 139 Satker	1.680.000
14	PHLN/RMP 7 Proyek	1.580.000

4. Berkenaan bahan raker yang disampaikan perlu dijelaskan konsistensi tujuan dan sasaran strategis Kemenristekdikti RI terhadap pola penganggaran, karenanya Komisi X DPR RI tidak dapat membahas dan menelaah RKP dan RKA-K/L TA 2018 secara mendalam, termasuk pula Komisi X DPR RI tidak menelaah anggaran untuk layanan umum (ristek).
5. Terhadap dokumen rapat dan usul pagu indikatif RAPBN TA 2018 sebagaimana dimaksud pada huruf II.A angka 1 s.d. angka 3, Komisi X DPR RI belum menyetujui usulan pagu indikatif maupun alokasi anggaran di masing-masing Unit Utama/Ditjen dan program/kegiatan, karena Komisi X DPR RI memerlukan pendalaman lebih lanjut. Untuk selanjutnya, Komisi X DPR RI meminta Kemenristekdikti RI untuk membuat perbandingan (komparasi) kinerja tahun 2015, 2016, dan tahun 2017 serta target/sasaran tahun 2018 sebagai referensi dalam perbaikan RKP dan RKA-K/L TA 2018.
6. Terhadap RKP dan RKA K/L TA 2018 Kemenristekdikti RI, Komisi X DPR RI memberikan catatan antara lain:
 - 1) Komisi X DPR RI meminta Kemenristekdikti RI untuk menyampaikan rasionalitas rencana pengalokasian biaya, rencana penentuan target, dan total alokasi anggaran TA 2018 terhadap usulan 12 (dua belas) proyek prioritas (nasional) dan 14 (empat belas) kegiatan priroitas Kemenristekdikti RI.
 - 2) Komisi X DPR RI meminta Kemenristekdikti RI untuk mengkaji nomenklatur 12 (dua belas) rencana proyek prioritas (nasional) dan 14 (empat belas) kegiatan prioritas Kemenristekdikti tahun 2018 untuk dilakukan penyesuaian.
 - 3) Komisi X DPR RI meminta Kemenristekdikti RI untuk menyampaikan sandingan rancangan kegiatan prioritas TA 2017 dan 2018, indikator dan target, serta usulan rincian rencana pemanfaatan kenaikan pagu indikatif TA 2018 sebesar Rp3,212 triliun terhadap pagu indikatif RAPBN TA 2017.
 - 4) Komisi X DPR RI meminta Kemenristekdikti RI untuk menyampaikan peta jalan (*road map*) pengembangan pendidikan tinggi dan penguatan kelembagaan yang dikaitkan dengan prioritas nasional dan program prioritas di bidang pendidikan.

- 5) Komisi X DPR RI meminta Kemenristekdikti RI untuk mengevaluasi hasil riset perguruan tinggi yang terkait dengan pemanfaatan pembangunan nasional.
 - 6) Komisi X DPR RI meminta Kemenristekdikti RI untuk menyampaikan rencana penggunaan dana PHLN, posisi PHLN tahun 2018, dan hasil yang diperoleh atas pemanfaatan dana PHLN tersebut.
 - 7) Komisi X DPR RI meminta Kemenristekdikti RI untuk mengevaluasi sistem pendanaan pengembangan sarana dan prasarana PTN dan Program Pembinaan PTS (PP PTS) yang lebih berkeadilan, dan berbasis indikator yang lebih jelas.
 - 8) Komisi X DPR RI meminta Kemenristekdikti RI untuk mengkaji sistem dan kebijakan beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB) supaya hasilnya lebih bermanfaat bagi Indonesia, dan saling menguntungkan kedua belah pihak.
 - 9) Komisi X DPR RI meminta Kemenristekdikti RI agar pembukaan prodi khusus Blok Masela telah dilakukan kajian yang komprehensif.
7. Komisi X DPR RI meminta Kemenristekdikti RI untuk menyampaikan jawaban secara tertulis terhadap pertanyaan/saran Anggota Komisi X DPR RI dan menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada poin II.A.4 dan 8 ke Sekretariat Komisi X DPR RI paling lambat 23 Juni 2017.

B. Lain-Lain

Komisi X DPR RI meminta Kemenristekdikti RI agar pemilihan rektor harus mengacu pada sistem pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (diantaranya UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi).

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul **13.20** WIB

**MENTERI RISET TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI RI,**



MOHAMAD NASIR

KETUA RAPAT,



FERDIANSYAH, S.E., M.M